

Peran Infrastruktur Politik dalam Mendukung Kemajuan Politik Di Indonesia

Yulita Puji Lestari, S.H., M.H.^{a,1*}, Mela Maelatussa'adah^{b,2}, Iqlima Amalia Sopiana^{b,3}, Anisa Rohimah^{b,4}

^aDosen; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^bMahasiswa; Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹dosen00442@unpam.ac.id; ²maelamela82@gmail.com; ³Iqlimaamalia98@gmail.com;

⁴annisarohimah05@gmail.com

Naskah diterima: 5 Juli 2022, direvisi: 15 Juli 2022, disetujui: 25 Juli 2022

Abstrak

Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui atau kurang mengenal apa itu infrastruktur politik, hal ini menarik untuk dibahas karena pada dasarnya infrastruktur ini banyak mendukung dan mendorong kemajuan di Indonesia. Secara sederhana, infrastruktur dapat diartikan sebagai pembangunan. Tujuan utama infrastruktur politik adalah membawa aspirasi dan kepentingan rakyat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa infrastruktur berperan penting mendukung dan mendorong kemajuan negara Indonesia, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apa sajakah peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia? Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia. Maka dari itu manfaat dari adanya penelitian ini dapat mengetahui peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan unsur dari struktur politik. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Dibentuknya struktur politik bertujuan untuk memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara Indonesia sehingga masyarakat harus mengetahui bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor pendukung dan pendorong kemajuan politik di Indonesia.

Kata-kata kunci: infrastruktur politik; kemajuan; politik di Indonesia

Abstract

The Role of Political Infrastructure in Supporting Political Progress in Indonesia. Many ordinary people do not know or do not know what political infrastructure is, this is interesting to discuss because basically this infrastructure supports and encourages progress in Indonesia. In simple terms, infrastructure can be defined as development. The main purpose of political infrastructure is to bring the aspirations and interests of the people into the administration of the state government. Infrastructure plays an important role as one of the driving wheels of development and economic growth. The existence of adequate infrastructure is very necessary and becomes a very important part of the community service system. It is unfortunate that there are still many people who do not realize that infrastructure plays an important role in supporting and

encouraging the progress of the Indonesian state, the formulation of the problem that can be taken is what is the role of political infrastructure in supporting and encouraging political progress in Indonesia? Therefore, the purpose of this research is to find out how the role of political infrastructure in supporting and encouraging political progress in Indonesia. Therefore, the benefit of this research is to know the role of political infrastructure in supporting and encouraging political progress in Indonesia. In this research, the researcher uses library research method. The results of this study reveal that infrastructure is an element of the political structure. The political structure is the whole part or component (in the form of institutions) in a political system that carries out certain functions or tasks. The establishment of a political structure aims to facilitate the realization of the ideals and goals of the Indonesian people or state so that people must know that infrastructure is one of the supporting factors and drivers of political progress in Indonesia.

Keywords: *political infrastructure; progress; political in Indonesia*

Pendahuluan

Banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui atau kurang mengenal apa itu infrastruktur politik, hal ini menarik untuk dibahas karena pada dasarnya infrastruktur ini banyak mendukung dan mendorong kemajuan di Indonesia. Kata infrastruktur mungkin tidak sedikit banyak dikenali masyarakat karena bukan kata serapan sehari-hari. Namun bagi generasi yang hidup pada zaman Presiden Suharto pasti mengenali istilah ini karena pada masa pemerintahan beliau infrastruktur dalam negeri terus digencarkan dengan sistem pemerintahannya yang inward looking. Secara sederhana, infrastruktur dapat diartikan sebagai pembangunan.

Dalam arti lain, infrastruktur politik menjadi suatu rangkaian yang menggabungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan rangkaian tertentu.

Tujuan utama infrastruktur politik adalah membawa aspirasi dan kepentingan rakyat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam proses kenegaraan, infrastruktur politik sebagai institusi berperan penting dalam memberikan berbagai informasi kepada penguasa/pemerintah. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui pentingnya infrastruktur, namun nyatanya banyak manfaat infrastruktur yang mendukung dan memajukan pembangunan negara dan masyarakat.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).

Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa infrastruktur berperan penting mendukung dan mendorong kemajuan negara Indonesia, dengan mempelajari infrastruktur politik diharapkan masyarakat menjadi tau apa saja yang termasuk infrastruktur yang ada di Indonesia.

Infrastruktur yaitu fasilitas yang ada, antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dan infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Masyarakat diharapkan sadar bahwa infrastruktur adalah hal penting, karena adanya infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing, serta berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan bisa menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier. Pada akhirnya, hal itu akan menciptakan lapangan bisnis yang baru dan memberikan output yang berasal dari hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Dari latar belakang tersebut rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apa sajakah peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia?

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia. Maka dari itu manfaat dari adanya penelitian

ini dapat mengetahui peran Infrastruktur politik dalam mendukung dan mendorong kemajuan politik di Indonesia.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam referensi yang dapat dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis (Raharjo, 2020). Adapun penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam buku, majalah, jurnal, serta data pendukung lainnya. Sehingga data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dasar bagi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sistem ini dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang membatasi kepentingan umum masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Menurut penulis, sistem politik adalah seperangkat pendapat, prinsip pembentukan entitas yang saling berhubungan untuk mengatur pemerintahan dan menjalankan dan mempertahankan kekuasaan oleh individu atau kelompok individu atau hubungan dengan negara yang diatur antar negara bagian yang berhubungan.

Infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media komunikasi politik.

1. Partai Politik

Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki arah, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki status politik, biasanya menggunakan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan.

Robert K. Carr, Political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government (Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah). Dimana Partai politik disini adalah organisasi yang berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrol pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya dalam pemerintahan melalui mekanisme hak pilih universal.

Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam masalah ini untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Partai politik tidak boleh sembarangan memilih eksekutif ketika memutuskan eksekutif mana yang akan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Organisasi politik seperti partai politik tentu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk memudahkan mereka melindungi kepentingannya, partai politik kemudian membentuk organisasi atau kelompok yang berafiliasi dengan partai itu sendiri. Hal ini terkait dengan peran partai dalam memfasilitasi pembentukan koalisi oleh eksekutif.

Partai politik memiliki banyak strategi untuk mencapai tujuannya. Peran dibagi menjadi peran internal dan peran eksternal. Strategi eksternal bertujuan untuk memperkuat daya tawar dan posisi tawar partai politik. Oleh karena itu, sebagai partai politik, partai berkewajiban menghasilkan eksekutif yang berkualitas dan tentunya menjadi pemimpin bangsa. Secara umum, partai politik merupakan alat bagi eksekutif yang ingin menduduki posisi elit struktural. Bupati, walikota, gubernur, dan presiden merupakan jabatan yang dapat diperoleh melalui partai politik. Peran partai politik tetap sangat penting dalam proses politik Indonesia. Kepekaan terhadap partai ini mempengaruhi perilaku memilih, karena partai ini berperan sebagai lembaga pendidikan politik.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sering didefinisikan sebagai kelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan dihadapkan pada persaingan politik dari kelompok kepentingan lain. Kelompok pemangku kepentingan merupakan salah satu kekuatan kunci dalam komposisi politik dan pada tahap tertentu dapat memperkuat sistem politik dalam bentuk munculnya kelompok-kelompok

politik yang menekankan pada pluralisme dan persaingan dalam masyarakat.

Hal ini karena masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui kelompok kepentingan. Pada kenyataannya, kelompok pemangku kepentingan telah muncul dalam kehidupan politik modern dalam berbagai bentuk gerakan dan organisasi pemangku kepentingan.

Peran para kelompok kepentingan ini dalam mendukung mendorong pengembangan kebijakan seringkali terdiri dari berbagai agenda, penerbit, diseminasi ide, pembuat kebijakan, dan tekanan pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan aspirasi yang telah dirumuskan secara langsung kepada pemerintah.

3. Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah kelompok yang bekerja secara sistematis untuk memenuhi tuntutan umum partai politik untuk menguasai ranah kekuasaan.

Kelompok penekan ini biasanya hanya berfokus pada satu isu saja, seperti yang terjadi dalam gerakan anti nuklir di Inggris pada awal dekade 1980-an (McNair,1999:9). Kelompok yang tertarik lebih cenderung menggunakan berbagai bentuk periklanan dan strategi hubungan masyarakat untuk mendorong minat mereka.

4. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi politik merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pesan politik yang sangat penting. Peran berbagai jenis media komunikasi dalam mendukung kemajuan politik adalah sebagai berikut:

- Ponsel adalah sarana komunikasi yang menyampaikan informasi politik pribadi. Pada titik ini, pesan yang dikirimkan oleh komunikator diterima langsung oleh komunikator dan biasanya bersifat pribadi.

- Radio, Dalam hal ini, radio dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau media lain, memberikan peluang besar untuk kampanye politik.
- Televisi, berperan sebagai media kampanye. Terutama terkait konstruksi citra kandidat. Mengingat bahwa hampir setiap keluarga saat ini memiliki setidaknya satu TV di rumah, menonton TV dapat secara signifikan meningkatkan kemasyhuran kandidat.
- Surat kabar dan majalah yang menyajikan informasi politik dalam bentuk teks, grafik, dan gambar.
- Media online, saluran komunikasi massa yang paling mudah diakses.
- Media sosial, dikarenakan tingkat kepopulerannya sangat tinggi dan banyak kalangan yang menggunakan media sosial ini, jadi perannya dalam menyebarkan informasi politik sangat efektif.
- Poster dan spanduk, media berisikan slogan-slogan untuk mempublikasikan atau mempromosikan kegiatan, produk, visi misi, dan sebagainya.

Jadi, infrastruktur merupakan unsur dari struktur politik. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Dibentuknya struktur politik yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur bertujuan untuk memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara Indonesia sehingga masyarakat harus mengetahui bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor pendukung dan pendorong kemajuan politik di Indonesia.

Kesimpulan

Sistem politik adalah seperangkat pendapat, prinsip pembentukan entitas yang saling berhubungan untuk mengatur

pemerintahan dan menjalankan dan mempertahankan kekuasaan oleh individu atau kelompok individu atau hubungan dengan negara yang diatur antar negara bagian yang berhubungan.

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media komunikasi politik. Partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya dalam pemerintahan melalui mekanisme hak pilih universal.

Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan sering didefinisikan sebagai kelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan dihadapkan pada persaingan politik dari kelompok kepentingan lain.

Kelompok pemangku kepentingan merupakan salah satu kekuatan kunci dalam komposisi politik dan pada tahap tertentu dapat memperkuat sistem politik dalam bentuk munculnya kelompok-kelompok politik yang menekankan pada pluralisme dan persaingan dalam masyarakat.

Media Komunikasi Politik Media komunikasi politik merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pesan politik yang sangat penting.

Dibentuknya struktur politik yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur bertujuan untuk memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara Indonesia sehingga masyarakat harus mengetahui bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor pendukung dan pendorong kemajuan politik di Indonesia.

Referensi

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
- Junaedi, F. (2017). Relasi terorisme dan media. *Jurnal Aspikom*, 1(1), 15-25.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Razaqtar, A. Z. (2016). Peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah: Studi upaya partai Golkar dalam memenangkan pasangan calon Juliyatmono-Rohadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda*, 5(3).
- Solihin, O. (2020). Media Komunikasi Politik.
- Zainuddin, M. Rekalkulasi Transformasi Kelompok Penekan Menjadi Partai Politik: Kajian pada Hizbut Tahrir Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(28), 50-58.
- Zaman, R. K., & Misnan, M. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 4(1), 41-53